

## Kebijakan Pendudukan Jepang di Indonesia 1942-1945

Rosmaida Sinaga<sup>1</sup> Gabriel Joey Febriand Sinurat<sup>2</sup> Thoriq Aulia<sup>3</sup> Nadya Khaterina Manurung<sup>4</sup>

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [rosmaidasinaga@unimed.ac.id](mailto:rosmaidasinaga@unimed.ac.id)<sup>1</sup> [gabrielfebriand@gmail.com](mailto:gabrielfebriand@gmail.com)<sup>2</sup>  
[thoriqaulia547@gmail.com](mailto:thoriqaulia547@gmail.com)<sup>3</sup> [nadyamanurung2904@gmail.com](mailto:nadyamanurung2904@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses awal masuknya Jepang di Indonesia, penetapan kebijakan pemerintah pendudukan Jepang di bidang ekonomi dan sosial, dan dampak penerapan kebijakan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan tahapan heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses awal masuknya Jepang di Indonesia dimulai dengan serangkaian peristiwa yang bertalian dengan Perang Dunia II di Asia Pasifik. Penerapan kebijakan pemerintah pendudukan Jepang di bidang ekonomi berfokus pada pemanfaatan sumber daya untuk mendukung kebutuhan perang yang berdampak pada penderitaan rakyat. Penerapan kebijakan di bidang sosial berfokus pada mobilisasi romusha dan pengerahan jugun ianfu.

**Kata Kunci:** Kebijakan Ekonomi, Kebijakan Sosial. Pendudukan Jepang, Indonesia

### Abstract

*This research aims to find out the initial process of Japanese entry in Indonesia, the establishment of Japanese occupation government policies in the economic and social fields, and the impact of the implementation of Japanese occupation government policies in Indonesia. The method used in this research is the historical method with the stages of heuristics, criticism, interpretation and historiography. Based on the results of the research, it is known that the initial process of Japanese entry in Indonesia began with a series of events related to World War II in the Asia Pacific. The implementation of the Japanese occupation government's policies in the economic field focused on the utilisation of resources to support the needs of the war which had an impact on the suffering of the people. The implementation of policies in the social field focused on the mobilisation of romusha and the deployment of jugun ianfu.*

**Keywords:** Economic Policy, Social Policy. Japanese Occupation, Indonesia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang pada tahun 1942 menandai periode baru dalam sejarah Indonesia yang penuh dengan penderitaan dan perubahan drastis. Jepang dengan cepat merebut wilayah-wilayah strategis di Indonesia dari Belanda, dimulai dengan jatuhnya Tarakan pada 12 Januari 1942. Pada 8 Maret 1942, Jepang secara resmi menduduki Indonesia, mengakhiri pemerintahan Belanda dan memulai era pendudukan militer Jepang (Fadli & Kumalasari, 2019). Setelah menguasai Indonesia, Jepang mengganti sistem pemerintahan kolonial Belanda dengan pemerintahan militer. Mereka membagi Indonesia menjadi tiga wilayah administratif utama: Sumatera, Jawa-Madura, dan daerah-daerah timur seperti Sulawesi dan Kalimantan, masing-masing diatur oleh unit militer Jepang. Pemerintahan Jepang berusaha menghapus pengaruh Barat dan mempersiapkan struktur pemerintahan dengan menggantikan pejabat Belanda dengan pegawai lokal yang terdidik. Dalam hal ekonomi, Jepang menerapkan kebijakan yang sangat berfokus pada kebutuhan

perang mereka. Mereka mengambil alih pabrik-pabrik yang sebelumnya dikuasai Belanda dan mengelolanya dengan perusahaan Jepang. Jepang juga menerapkan sistem autarki, yang memaksa rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri sambil mendukung perang Jepang. Ini termasuk pengumpulan hasil perkebunan dan penerapan sistem tonarigumi, di mana kelompok-kelompok tetangga mengumpulkan setoran untuk Jepang. Kebijakan ini berdampak pada eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja Indonesia (Duma Lumban Gaol & Reka Seprina<sup>2</sup>, 2023).

Secara sosial, masa pendudukan Jepang membawa perubahan yang sangat signifikan. Jepang memperkenalkan sistem Romusha, yaitu kerja paksa yang awalnya bersifat sukarela namun kemudian menjadi wajib. Banyak pekerja Romusha mengalami kondisi kerja yang sangat berat dan kurangnya perhatian terhadap kesehatan mereka. Selain itu, Jepang juga memperkenalkan sistem Kinrohosi (kerja sukarela) yang pada kenyataannya sering kali berubah menjadi kerja paksa. Praktik lain yang sangat kontroversial adalah perekrutan wanita Indonesia sebagai jugun lanfu (wanita penghibur) untuk melayani tentara Jepang, yang sering kali menipu mereka dengan janji pekerjaan yang lebih baik. Ketidakadilan dan penderitaan ini memicu kemarahan dan nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia, memotivasi mereka untuk melawan penjajahan Jepang (Duma Lumban Gaol & Reka Seprina<sup>2</sup>, 2023). Masa pendudukan Jepang di Indonesia, meskipun singkat, meninggalkan dampak yang mendalam pada masyarakat dan ekonomi Indonesia. Jepang mengubah struktur pemerintahan dan ekonomi dengan tujuan memaksimalkan dukungan untuk perang mereka, namun kebijakan-kebijakan ini sering kali menyebabkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Penelitian mengenai periode ini penting untuk memahami bagaimana kolonialisme Jepang mempengaruhi masyarakat Indonesia dan bagaimana resistensi terhadap penjajahan berkembang selama periode tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penulisan penelitian ini menggunakan metodologi sejarah, yaitu langkah-langkah yang meliputi pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (penulisan). Metodologi sejarah ini bertujuan untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu, dalam hal ini kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia di bawah kebijakan pendudukan Jepang. Dalam penelitian ini, pengumpulan sumber atau heuristik hanya dilakukan menggunakan sumber sekunder. Sumber sekunder berupa buku, artikel, atau dokumen yang sudah ditulis oleh peneliti sebelumnya, akan digunakan untuk memahami situasi yang terjadi saat itu. Setelah sumber terkumpul, dilakukan kritik sumber, yang terdiri dari kritik internal untuk memverifikasi kebenaran isi sumber, dan kritik eksternal untuk memastikan keaslian materi (Madjid, 2011). Langkah berikutnya adalah interpretasi, yaitu menganalisis dan menggabungkan informasi dari berbagai sumber untuk memahami peristiwa tersebut secara menyeluruh. Terakhir, data dan hasil analisis disusun dalam bentuk tulisan sejarah atau historiografi, yang menggambarkan bagaimana kebijakan Jepang memengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia selama masa pendudukan. Metode ini memastikan bahwa hasil penelitian memiliki dasar yang kuat dan relevan untuk menggambarkan situasi tersebut (Kuntowijoyo, 2018).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Awal Masuknya Jepang di Indonesia**

Masuknya Jepang ke Indonesia dimulai dengan serangkaian peristiwa penting yang berkaitan dengan Perang Dunia II di Asia Pasifik. Jepang, yang berusaha membangun imperium di Asia, memulai serangannya dengan serangan mendadak ke Pearl Harbor pada 7 Desember 1941, yang mengakibatkan Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk Hindia

Belanda, terlibat dalam perang melawan Jepang. (Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 2019) Pada 8 Desember 1941, pemerintah Hindia Belanda secara resmi menyatakan perang terhadap Jepang. Indonesia, yang kala itu masih berada di bawah kekuasaan Belanda, langsung menjadi target serangan Jepang. Jepang melancarkan serangan ke Hindia Belanda (Indonesia) pada Januari 1942, dimulai dengan serangan udara dan pendaratan pasukan di wilayah-wilayah strategis, seperti Tarakan (11 Januari 1942), Balikpapan (24 Januari 1942), Pontianak (29 Januari 1942), dan Banjarmasin (10 Februari 1942). (Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 2019) Dalam waktu yang relatif singkat, Jepang berhasil menguasai sebagian besar wilayah Indonesia, dan pada 9 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat melalui Perjanjian Kalijati. Hal ini menandai dimulainya masa pendudukan Jepang di Indonesia (Fadli & Kumalasari, 2019).

Jepang memperkenalkan berbagai perubahan untuk menghapus pengaruh Barat dan memperkuat kekuasaannya. Dengan semboyan "Asia untuk Asia" dan kampanye propaganda "Tiga A" (Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia), mereka berusaha menarik simpati rakyat Indonesia, yang semula melihat Jepang sebagai pembebas dari penjajahan Belanda. Namun, pendudukan Jepang terbukti lebih brutal dan menimbulkan penderitaan yang lebih berat bagi rakyat Indonesia. Jepang juga mendirikan tiga pemerintahan militer di Indonesia: pemerintahan militer Angkatan Darat di Sumatra (pusat di Bukittinggi), di Jawa dan Madura (pusat di Jakarta), serta pemerintahan Angkatan Laut di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku (pusat di Makassar). Pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung hingga kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II pada tahun 1945, yang akhirnya membuka jalan bagi proklamasi kemerdekaan Indonesia (Fadli & Kumalasari, 2019).

### **Awal Penerapan Kebijakan**

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia selama Perang Dunia II, kebijakan pemerintahan Jepang memiliki dua prioritas utama: menghapus pengaruh Barat dan memobilisasi rakyat Indonesia untuk mendukung kemenangan Jepang dalam perang. Sama seperti pemerintahan kolonial Belanda sebelumnya, Jepang juga berusaha menguasai Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri. Namun, Jepang menghadapi tantangan yang serupa dengan yang dihadapi Belanda, dan menerapkan beberapa metode yang sama untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam konteks perang yang memanfaatkan sumber daya secara maksimal, Jepang memfokuskan upayanya pada mobilisasi rakyat, terutama di Jawa dan Sumatera (Fadli & Kumalasari, 2019). Untuk menghilangkan pengaruh Barat, Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan Inggris, serta memperkenalkan dan mempromosikan penggunaan bahasa Jepang. Selain itu, Jepang juga melarang buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris serta mengubah kalender resmi menjadi kalender Jepang. Berbagai perubahan dilakukan, seperti meruntuhkan patung-patung Belanda, mengganti nama jalan, dan memperbarui model sekolah. Ini adalah bagian dari kebijakan mereka yang dikenal sebagai *Language Planning*, yang bertujuan memperkuat pengaruh Jepang dan mengurangi pengaruh Barat di Indonesia.

Jepang melancarkan kampanye propaganda yang intensif untuk meyakinkan rakyat Indonesia bahwa mereka dan Jepang adalah saudara dalam perjuangan untuk menciptakan tatanan baru di Asia. Meskipun propaganda ini sering gagal akibat kenyataan pendudukan Jepang yang diwarnai oleh kekacauan ekonomi, teror, dan berbagai bentuk penyiiksaan, termasuk pemukulan dan pemerkosaan, Jepang tetap berusaha membangun dukungan melalui berbagai cara. Para petani dan rakyat Indonesia disugahi pesan-pesan ini melalui pengeras suara di desa-desa. Untuk memobilisasi rakyat, Jepang mencari pemimpin politik baru di Jawa setelah membubarkan semua organisasi politik yang ada pada Maret 1942. Mereka memanfaatkan Islam sebagai alat mobilisasi dan mendirikan Kantor Urusan Agama

(Shumubu) pada akhir Maret 1942. Jepang berusaha menarik keterlibatan para tokoh Islam untuk meredam gerakan perlawanan dan mendukung tujuan perang Jepang. Pada masa itu, Jepang mengadopsi kebijakan yang lebih bersahabat dengan Islam dibandingkan dengan pemerintahan kolonial Belanda, yang sebelumnya mengontrol ulama dan menggantikan Islam dengan hukum adat. Jepang mengeluarkan UU No. 2 pada 8 September 1942, yang mengendalikan seluruh organisasi nasional dan melarang kegiatan politik serta perkumpulan. Ini mengakibatkan lumpuhnya organisasi-organisasi nasional yang giat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, seperti Parindra dan GAPI. Untuk mengatasi hal ini, Jepang membentuk Gerakan Tiga A yang bertujuan untuk merekrut tenaga rakyat dalam menghadapi Sekutu. Namun, Gerakan Tiga A tidak bertahan lama karena kejayaan militer Jepang dan eksploitasi yang dilakukan.

Sebagai langkah berikutnya, Jepang membentuk PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) untuk menarik simpati rakyat dan mengerahkan tenaga nasionalis sekuler serta intelektual dalam perang melawan Sekutu. Meskipun PUTERA tidak menghasilkan karya konkret, organisasi ini berperan dalam membangun mentalitas bangsa menjelang proklamasi kemerdekaan. Di samping itu, Jepang juga membentuk organisasi-organisasi baru seperti Jawa Hokokai dan Peta (Pembela Tanah Air), yang merupakan pasukan sukarela Indonesia yang dilatih untuk mendukung Jepang. (Fadli & Kumalasari, 2019) Jepang juga memanfaatkan organisasi Islam seperti Masyumi dan Hizbullah untuk mendukung upaya perang Jepang. Masyumi, yang sebelumnya dikenal sebagai MIAI, diubah untuk memperkuat propaganda Jepang dengan menggalang semangat jihad melawan musuh. Hizbullah, yang didirikan pada 1944, merupakan organisasi pemuda berbasis Islam yang mendapat dukungan Jepang. Di samping Hizbullah, terdapat juga Keibodan (pertahanan sipil) dan Seinendan (barisan pemuda) yang dilatih untuk memperkuat pertahanan dan menumbuhkan rasa patriotisme dalam diri rakyat..

### **Penerapan Kebijakan Pemerintah Jepang di Bidang Ekonomi**

Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945), kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah Jepang membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Pada awalnya, rakyat Indonesia menyambut baik kedatangan Jepang karena mereka dipandang sebagai pembebas dari penjajahan Belanda. Namun, seiring berjalannya waktu, pandangan ini berubah ketika Jepang mulai mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia secara brutal untuk mendukung kebutuhan perang mereka. Ekonomi Indonesia berubah drastis menjadi ekonomi perang yang dikendalikan ketat oleh Jepang (Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 2019) dan (Inanna, 2023). Jepang menerapkan kebijakan ekonomi yang berfokus pada penyitaan aset-aset ekonomi penting. Mereka mengambil alih perkebunan, pabrik, dan bank yang sebelumnya dikelola oleh Belanda. Akibat kebijakan ini, perekonomian rakyat terpuruk dengan meningkatnya kemiskinan, produksi pangan yang menurun drastis, dan kelaparan yang meluas. Selain itu, inflasi parah terjadi karena Jepang mencetak uang tanpa jaminan, menyebabkan harga barang melambung tinggi (Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 2019). Pada tahun 1944, Jepang meningkatkan kebijakan pengumpulan bahan pangan secara besar-besaran untuk mendukung perang. Mereka menerapkan sistem autarki, yang berarti setiap daerah harus memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bergantung pada daerah lain. Tanaman-tanaman yang dianggap tidak penting untuk keperluan militer, seperti teh, kopi, dan tembakau, dibatasi produksinya. Pemerintah Jepang memberlakukan pengawasan ketat terhadap produksi pangan dan barang-barang lainnya, dengan sanksi berat bagi pelanggar (Inanna, 2023).

Selain penyitaan aset dan pengawasan ketat, Jepang juga melakukan rehabilitasi infrastruktur. Beberapa jembatan dan alat transportasi yang rusak diperbaiki untuk memastikan kelancaran distribusi hasil pertanian dan kebutuhan perang lainnya. Namun,

upaya ini tidak cukup untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda rakyat Indonesia. Perkebunan karet, teh, dan kopi menjadi sasaran utama Jepang untuk memenuhi kebutuhan militer mereka, namun banyak pabrik gula yang sebelumnya dihancurkan oleh Belanda dalam kebijakan bumi hangus tidak dapat dioperasikan secara optimal karena kekurangan tenaga ahli (Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 2019). Di sektor moneter, Jepang mengendalikan mata uang Hindia Belanda dengan mencetak uang baru. Bank-bank Belanda dilikuidasi dan digantikan oleh bank-bank Jepang. Kebijakan fiskal juga tidak adil, dengan perbedaan pajak yang sangat besar antara orang Eropa dan Cina. Sektor perdagangan pun mengalami stagnasi karena kelangkaan barang. Pemerintah Jepang menetapkan harga barang dan mengatur distribusi untuk mencegah terjadinya pasar gelap dan manipulasi harga (Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 2019). Masalah pangan semakin memburuk karena kebijakan pemerintah Jepang dalam memaksa rakyat menanam padi dan kapas sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan. Kapas ditanam dalam skala besar, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pakaian rakyat. Akibatnya, banyak orang terpaksa menggunakan bahan alternatif seperti karung. Pasar gelap semakin marak karena kesulitan dalam mengumpulkan padi, yang memperparah krisis pangan dan kelaparan di berbagai daerah (Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 2019).

Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi Jepang selama pendudukan mengubah perekonomian Indonesia menjadi ekonomi perang yang dikendalikan dengan sangat ketat. Jepang memprioritaskan pemanfaatan sumber daya alam dan tenaga kerja Indonesia untuk mendukung upaya militer mereka. Pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan perdagangan sangat ketat, sementara kebijakan ini berdampak buruk pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Kekurangan barang, inflasi yang meroket, dan kelaparan menjadi ciri utama dari masa pendudukan Jepang (Inanna, 2023). Dampak dari kebijakan ekonomi Jepang di Indonesia adalah penderitaan yang sangat besar bagi rakyat. Meskipun ada upaya rehabilitasi infrastruktur dan pengendalian harga, kontrol ketat yang dilakukan Jepang lebih banyak merugikan rakyat Indonesia daripada membantu mereka. Kesulitan hidup yang dihadapi selama masa pendudukan ini turut memicu kebangkitan semangat nasionalisme yang akhirnya mendorong perjuangan kemerdekaan setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II (Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 2019).

### **Penerapan Kebijakan Pemerintah Pendudukan Jepang di Bidang Sosial**

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945), kebijakan sosial yang diterapkan oleh Jepang membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Salah satu kebijakan utama di bidang sosial adalah pengambilalihan pabrik-pabrik yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda, yang kemudian dikelola oleh perusahaan Jepang untuk mendukung industri perang mereka (Fadli & Kumalasari, 2019) dan (Inanna, 2023). Jepang juga menerapkan sistem autarki, di mana masyarakat Indonesia dipaksa untuk swasembada dan memproduksi hasil bumi yang kemudian diserahkan kepada pemerintah Jepang. Kebijakan ini memperberat beban rakyat, karena mereka harus menyerahkan sebagian besar hasil produksi pertanian mereka untuk kepentingan Jepang (Inanna, 2023) dan (Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 2019). Salah satu implementasi penting dari kebijakan sosial Jepang adalah pembentukan sistem "tonarigumi", yaitu kelompok tetangga yang terdiri dari 10 hingga 20 keluarga yang bertanggung jawab mengumpulkan hasil bumi untuk disetorkan kepada pemerintah Jepang (Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 2019). Sistem ini dirancang untuk memudahkan pengawasan dan memastikan bahwa setiap keluarga berkontribusi dalam mendukung kebutuhan perang Jepang. Selain itu, sistem tonarigumi juga digunakan untuk mengatur

kehidupan sosial masyarakat, menciptakan kontrol yang lebih ketat atas kehidupan sehari-hari mereka (Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 2019).

Namun, kebijakan yang paling berdampak buruk adalah penerapan program kerja paksa yang dikenal sebagai "Romusha". Pada awalnya, program ini bersifat sukarela, tetapi karena meningkatnya kebutuhan tenaga kerja untuk proyek infrastruktur militer Jepang, seperti pembangunan landasan udara dan bunker, program ini berubah menjadi kerja paksa. Ribuan pemuda Indonesia dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk, tanpa makanan atau perawatan kesehatan yang memadai, sehingga banyak dari mereka yang meninggal selama menjalankan tugas Romusha. Kebijakan ini tidak hanya menciptakan penderitaan fisik tetapi juga merusak tatanan sosial masyarakat Indonesia (Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 2019). Selama pendudukan Jepang di Indonesia, pemerintah Jepang menerapkan kebijakan sosial yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Kebijakan ini bertujuan mendukung upaya Jepang dalam Perang Dunia II, terutama melawan Sekutu, namun membawa penderitaan besar bagi rakyat Indonesia. Masyarakat mengalami kemiskinan, kelaparan, kerja paksa, hingga kekerasan. Salah satu kebijakan yang paling dikenal adalah "Romusha", yaitu sistem kerja paksa di mana penduduk Indonesia dipekerjakan untuk proyek-proyek militer Jepang, seringkali dalam kondisi yang tidak manusiawi. Selain itu, ada juga kebijakan "Jugun Ianfu", yaitu eksploitasi perempuan Indonesia yang dipaksa menjadi pekerja seks untuk tentara Jepang. Kedua kebijakan ini menambah beban berat bagi masyarakat Indonesia pada masa pendudukan tersebut.

### **Romusha**

Romusha bukan hanya terjadi di dalam wilayah Indonesia, tetapi juga di luar negeri seperti Birma, Thailand, dan Vietnam. Para pekerja ini sering kali tidak kembali ke kampung halaman mereka karena meninggal dunia akibat kelelahan, kelaparan, dan penyakit. Akibatnya, struktur sosial di pedesaan berubah drastis, dengan desa-desa kehilangan tenaga kerja laki-laki yang sehat. Desa-desa yang ditinggalkan oleh para pemuda romusha mengalami kekurangan tenaga kerja, dan yang tersisa adalah perempuan, anak-anak, dan orang-orang tua (Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 2019). Pengerahan "Romusha" merupakan bagian dari eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh Jepang selama masa pendudukannya di Indonesia (1942-1945). Romusha adalah tenaga kerja paksa yang umumnya terdiri dari para pemuda, terutama petani dan penganggur, yang dimobilisasi untuk membantu upaya perang Jepang melawan Sekutu. Mereka bekerja di berbagai proyek, seperti pembangunan infrastruktur militer (jalan raya, jembatan, kubu pertahanan, dan lapangan udara), pabrik, serta di pelabuhan. Romusha juga dikirim ke luar Jawa, bahkan ke negara-negara lain seperti Burma, Muang Thai, Vietnam, dan Malaya (Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 2019).

Awalnya, pengerahan tenaga kerja ini bersifat sukarela dengan menggunakan propaganda "untuk kemakmuran bersama Asia Timur Raya". Namun, ketika kebutuhan tenaga kerja meningkat, pengerahan tersebut berubah menjadi paksaan (Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 2019). Badan-badan khusus, seperti "*Ramukyoku*" (Kantor Urusan Pekerja), dibentuk untuk mengorganisasi mobilisasi ini secara besar-besaran (Putri et al., 2018) dan (Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 2019). Walaupun "*Cho Sangi In*" (semacam dewan penasihat Indonesia pada masa pendudukan Jepang) mengusulkan agar pekerja diberi kontrak resmi, upah yang layak, dan bantuan kepada keluarga yang ditinggalkan, dalam praktiknya, kondisi para Romusha sangat buruk. Mereka bekerja dalam situasi yang keras, tanpa makanan dan perawatan kesehatan yang memadai, sehingga banyak yang sakit dan meninggal. Penyakit seperti malaria dan disentri menyebar di kalangan pekerja akibat buruknya kondisi sanitasi dan kesehatan (Marwati

Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 2019). Pada akhirnya, mobilisasi Romusha berdampak besar terhadap struktur sosial di Indonesia. Banyak pemuda yang melarikan diri dari desa-desa untuk menghindari menjadi Romusha, sementara di desa hanya tersisa perempuan, anak-anak, dan orang tua. Ketika perang berakhir, hanya sebagian dari Romusha yang berhasil kembali ke kampung halaman mereka, sementara banyak lainnya meninggal atau hilang. Pengerahan Romusha mencerminkan salah satu bentuk eksploitasi brutal yang dilakukan oleh Jepang selama masa pendudukannya di Indonesia, yang menyisakan luka mendalam dalam sejarah bangsa.

### **Jugun Ianfu**

Selain program Romusha, salah satu kebijakan paling kejam dari Jepang adalah pengerahan “Jugun Ianfu” atau budak seks. Jugun ianfu adalah istilah yang merujuk pada perempuan-perempuan yang dijadikan budak seks oleh militer Jepang selama masa pendudukan di berbagai wilayah, termasuk Indonesia, dalam Perang Dunia II (Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 2019). Sama seperti para pekerja paksa (romusha), para jugun ianfu direkrut dengan paksaan, tipuan, dan kekerasan. Mereka kebanyakan berasal dari desa-desa dan kondisi ekonomi yang sulit. Banyak dari mereka ditipu dengan janji akan diberi pekerjaan atau pendidikan, namun akhirnya dijadikan sebagai pekerja seks di rumah-rumah bordil yang disebut “ian-jo” (Fadli & Kumalasari, 2019) & (Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 2019). Pengerahan jugun ianfu dilakukan secara rahasia dan tidak diumumkan secara resmi. Para pejabat daerah, seperti lurah dan camat, serta tonarigumi (organisasi warga yang dikelola Jepang), turut membantu dalam proses rekrutmen. Para perempuan yang menjadi jugun ianfu sebagian besar berpendidikan rendah dan berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka mudah tertipu oleh tawaran pekerjaan yang menjanjikan. Di ian-jo, jugun ianfu mengalami perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Mereka diperiksa kesehatannya dengan cara yang merendahkan dan dipaksa melayani tentara dan warga sipil Jepang setiap hari. Banyak dari mereka yang masih di bawah umur, dan ada pula yang sudah menikah atau memiliki anak. Para jugun ianfu tidak hanya menderita secara fisik akibat pemerkosaan dan penyiksaan, tetapi juga secara psikis, mengalami trauma yang mendalam (Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 2019).

Contoh kisah nyata jugun ianfu seperti Mardiyem, seorang perempuan asal Yogyakarta yang direkrut dengan janji menjadi penyanyi, namun akhirnya dipaksa menjadi budak seks di Banjarmasin. Mardiyem adalah salah satu dari sekian banyak perempuan yang direndahkan dan dipaksa menjalani kehidupan penuh penderitaan di bawah kekuasaan militer Jepang. (Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 2019) Kebijakan Jugun Ianfu juga melibatkan perempuan dari kalangan etnis lainnya, termasuk perempuan Belanda yang ditawan Jepang. Mereka menghadapi pelecehan dan kekerasan yang serupa. Kondisi ini menggambarkan bagaimana pendudukan Jepang tidak hanya mengeksploitasi tenaga kerja laki-laki, tetapi juga memperlakukan perempuan sebagai objek yang direndahkan martabatnya. Eksploitasi yang dilakukan Jepang tidak hanya memicu penderitaan fisik, tetapi juga memunculkan semangat perlawanan. Para pejuang Peta (Pembela Tanah Air) dan rakyat Indonesia yang melihat penderitaan Romusha dan Jugun Ianfu tergerak untuk memulai pemberontakan melawan kekejaman Jepang. Mereka tidak bisa menahan diri melihat penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara sebangsa mereka yang dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi. Di sisi lain, sistem administrasi Jepang yang diterapkan selama masa pendudukan juga membawa perubahan dalam sistem birokrasi dan sosial masyarakat Indonesia. Banyak pejabat lokal yang dilibatkan dalam pemerintahan Jepang, meskipun dalam posisi yang terbatas. Ini memberi mereka pengalaman baru dalam administrasi pemerintahan

yang kemudian menjadi penting pada masa awal kemerdekaan Indonesia (Fadli & Kumalasari, 2019).

Kebijakan ekonomi yang diterapkan Jepang juga menekan masyarakat secara sosial dan politik. Sistem "Tonarigumi" atau rukun tetangga, yang terdiri dari kelompok kecil 10-20 keluarga, dibentuk untuk mengawasi penduduk dan mengumpulkan bahan-bahan kebutuhan untuk mendukung perang (Fadli & Kumalasari, 2019) & (Putri et al., 2018). Ini menjadi salah satu bentuk kontrol sosial yang semakin menekan masyarakat Indonesia. Melalui kebijakan ini, Jepang memonopoli hasil perkebunan dan mengerahkan sumber daya alam Indonesia untuk keperluan perang mereka (Putri et al., 2018). Meskipun masa pendudukan Jepang penuh dengan penderitaan, dampak sosial yang dihasilkan tidak hanya berupa kesengsaraan. Dalam beberapa hal, eksodus pemuda dari desa-desa untuk menjadi romusha, serta keterlibatan mereka dalam organisasi pemuda dan militer seperti Peta, memperluas wawasan masyarakat Indonesia tentang dunia luar. Pengalaman ini, meskipun pahit, membawa pemahaman baru tentang kekuatan politik, dan akhirnya menyumbang pada munculnya gerakan kemerdekaan. Secara keseluruhan, kebijakan pendudukan Jepang di Indonesia tidak hanya berdampak pada kerusakan ekonomi dan sosial, tetapi juga menimbulkan penderitaan besar melalui eksploitasi manusia, baik melalui program Romusha maupun Jugun Ianfu. Penderitaan ini, meskipun sangat menyakitkan, turut membangkitkan semangat perlawanan yang kemudian menjadi titik awal bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia.

### **Dampak Penerapan Kebijakan Pemerintah Jepang di Bidang Ekonomi**

Dampak penerapan kebijakan pemerintah Jepang di bidang ekonomi, yaitu peningkatan eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja rakyat Indonesia. Jepang memanfaatkan kekayaan alam Indonesia untuk mendukung upaya perang mereka (Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 2019) dan (Putri et al., 2018). Hal ini terlihat dari penempatan kontrol ketat terhadap berbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, dan pertambangan, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan material bagi tentara Jepang. Masyarakat lokal sering kali dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang sangat buruk dan tanpa imbalan yang layak. Seperti yang tercatat, "paksaan kerja bagi rakyat untuk mendukung usaha perang Jepang" menyebabkan banyak orang menderita secara ekonomi dan sosial (Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 2019) dan (Gunawan, 2010). Di samping itu, Jepang juga menerapkan sistem ekonomi yang bersifat monopoli. Mereka mengendalikan distribusi barang dan pengadaan bahan baku, yang mengakibatkan hilangnya daya saing bagi pedagang lokal. Ekonomi rakyat yang sebelumnya beragam kini terdesak untuk memenuhi kepentingan Jepang. Sektor-sektor yang dulunya dipegang oleh masyarakat lokal kini beralih ke tangan Jepang, yang secara langsung menghancurkan jaringan ekonomi masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya menguntungkan pihak Jepang tetapi juga menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang berkepanjangan bagi rakyat Indonesia setelah masa pendudukan berakhir (Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 2019) dan (Inanna, 2023). Dampak lain yang signifikan adalah terjadinya perubahan dalam pola konsumsi masyarakat. Kebijakan Jepang yang memprioritaskan kebutuhan militer berdampak pada ketersediaan barang untuk rakyat. Keterbatasan sumber daya menyebabkan kelangkaan bahan pokok, dan masyarakat harus beradaptasi dengan situasi baru ini. Kelangkaan barang dan eksploitasi yang tinggi menambah beban ekonomi masyarakat, menciptakan situasi yang sulit bagi banyak keluarga untuk bertahan hidup. Akibatnya, kebijakan ekonomi Jepang yang represif ini meninggalkan dampak yang mendalam dan berkepanjangan dalam sejarah ekonomi Indonesia (Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 2019).

### **Dampak Penerapan Kebijakan Pemerintah Jepang di Bidang Sosial**

Dampak penerapan kebijakan pemerintah Jepang di bidang sosial, yaitu pembatasan kebebasan berorganisasi dan pengawasan ketat terhadap aktivitas masyarakat. Jepang berusaha mengendalikan kehidupan sosial dengan membubarkan organisasi-organisasi politik yang ada dan menggantinya dengan organisasi yang dikendalikan oleh mereka, seperti PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat). Organisasi ini dibentuk untuk mengarahkan dukungan rakyat kepada Jepang dan meredam potensi perlawanan (Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 2019) dan (Gunawan, 2010). Dengan langkah ini, pemerintah Jepang berusaha membatasi partisipasi politik masyarakat dan menghilangkan suara-suara kritis yang berpotensi menentang mereka. Selanjutnya, Jepang juga melakukan propaganda untuk membangun hubungan baik dengan komunitas Islam di Indonesia. Mereka menyadari bahwa pemimpin Islam memiliki pengaruh besar dalam masyarakat (Fadli & Kumalasari, 2019). Dengan mendekati komunitas Muslim, Jepang berharap dapat meredam potensi perlawanan dari pihak yang memiliki pengaruh sosial yang kuat. Namun, di balik pendekatan ini, banyak pemimpin Islam dan masyarakat umum yang merasa tertekan oleh tindakan Jepang yang lebih bersifat represif, seperti penangkapan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap mereka yang dianggap sebagai oposisi. Ini menciptakan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan masyarakat, meskipun Jepang berusaha membangun citra positif di hadapan rakyat (Fadli & Kumalasari, 2019) dan (Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 2019). Akhirnya, kebijakan sosial Jepang juga berdampak pada kebangkitan semangat nasionalisme di Indonesia (Gunawan, 2010). Meskipun Jepang berupaya untuk mengontrol masyarakat, tindakan kekerasan dan penindasan yang mereka lakukan justru mendorong rakyat untuk bersatu dan berjuang demi kemerdekaan. Janji-janji yang tidak ditepati tentang kemerdekaan semakin memperkuat tekad rakyat untuk meraih kemandirian. Munculnya berbagai organisasi baru yang berjuang untuk kemerdekaan menjadi fondasi penting bagi proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 (Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 2019). Dengan demikian, meskipun Jepang berusaha mengendalikan aspek sosial, tindakan mereka justru mempercepat proses kebangkitan nasionalisme yang membawa perubahan signifikan dalam sejarah Indonesia.

### **KESIMPULAN**

Kebijakan pendudukan Jepang di Indonesia antara tahun 1942 hingga 1945 membawa dampak yang mendalam dan kompleks bagi masyarakat Indonesia. Meskipun Jepang berusaha memanfaatkan kekayaan alam dan sumber daya manusia Indonesia untuk kepentingan perang, kebijakan tersebut justru menciptakan penderitaan yang luar biasa bagi rakyat. Eksploitasi dalam bentuk kerja paksa, penyitaan aset, dan pengalihan produksi untuk kebutuhan militer memperparah kemiskinan dan kelaparan. Hal ini menandai berakhirnya kebijakan ekonomi yang adil dan menyebabkan ketidakstabilan yang berkepanjangan setelah masa pendudukan berakhir. Di bidang sosial, pemerintah Jepang menerapkan pengawasan ketat yang membatasi kebebasan berorganisasi dan berpolitik. Pembubaran organisasi politik lokal dan penggantian dengan organisasi yang dikuasai Jepang, seperti PUTERA, menunjukkan usaha mereka untuk meredam potensi perlawanan. Meskipun Jepang berusaha membangun hubungan baik dengan komunitas Islam, tindakan represif mereka terhadap pemimpin dan masyarakat menciptakan ketidakpuasan yang mendalam. Akibatnya, meskipun ada upaya untuk mengendalikan kehidupan sosial, banyak rakyat justru semakin tergerak untuk bersatu melawan penindasan. Selain itu, kebangkitan semangat nasionalisme menjadi salah satu dampak penting dari kebijakan Jepang. Tindakan kekerasan dan janji-janji yang tidak ditepati oleh Jepang justru memperkuat tekad rakyat untuk meraih kemerdekaan. Munculnya berbagai organisasi baru yang berjuang untuk kemerdekaan menjadi fondasi bagi

proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, meskipun Jepang bertujuan untuk mengendalikan dan mengeksploitasi Indonesia, mereka secara tidak langsung mempercepat proses kebangkitan nasionalisme yang menjadi langkah awal menuju kemerdekaan bangsa Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Duma Lumban Gaol, & Reka Seprina<sup>2</sup>. (2023). Ketatanegaraan Indonesia Dibawah Masa Pendudukan Jepang (1942-1945). *Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, 3(1), 2829–5137. <https://doi.org/10.22437/krinok.v3i1.32084>
- Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang. *Sejarah Dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 13(2), 189. <https://doi.org/10.17977/um020v13i22019p189-205>
- Gunawan, A. (2010). Kebijakan Pemerintahan Militer Jepang Pada Masa Pendudukan Jepang Di Indonesia (1942-1945). Universitas Hasanuddin.
- Inanna, N. &. (2023). *Perekonomian Indonesia* (Rahmatullah (ed.); 1st ed.). Tahta Media Group. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/449/447>
- Kuntowijoyo. (2018). Pengantar Ilmu Sejarah. In *Ilmu Sejarah dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Penerbit Tiara Wacana.
- Madjid, A. R. H. & M. S. (2011). *Pengantar Ilmu Sejarah*. : Penerbit Ombak.
- Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto. (2019). *Sejarah Nasional Indonesia Edisi Pemutakhiran Jilid 6: Zaman Jepang dan Zaman Republik* (R. P. S. R. Z. Leirissa (ed.); VI). PT (Persero) Penerbitan dan Percetakan BALAI PUSTAKA. <https://archive.org/details/sejarah-nasional-indonesia-jilid-6-zaman-jepang/page/n3/mode/2up>
- Putri, T. A., Syaiful, M., & Arif, S. (2018). Propaganda Jepang dalam Melancarkan Kebijakan Pendudukan di Indonesia Tahun 1942-1945. *Pesagi*, 6(1), 4–5.